

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi serta internet semakin berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut ternyata memberikan dampak serta pengaruh pada dunia jurnalistik. Ketika media baru dengan kecanggihan media-sosialnya terus menyerang khalayak, sehingga harus diakui bahwa gawai telah menggantikan perangkat dan peran media lama, seperti televisi, radio, majalah, dan surat kabar. Sebelumnya jurnalistik berfokus pada penyiaran dan percetakan saja, tetapi saat ini jurnalistik di Indonesia sudah berkembang secara daring dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi.

Situasi ini secara otomatis berubah menjadi kenyataan baru bahwa kekuatan media sosial telah mengubah khalayak yang awalnya menerima pesan pasif menjadi pengirim pesan aktif untuk merekam, membangun dan mendistribusikan pesan melalui media, yaitu gawai. (Halim, 2019). Di sisi lain, ada juga fakta yang perlu dicermati, yakni fenomena maraknya konten media baru dengan segala orisinalitasnya, belakangan ini menjadi ancaman serius bagi eksistensi karya dokumenter dan jurnalistik.

Banyak fenomena menarik terkait keberadaan karya jurnalistik dan dokumenter melalui media televisi. Sedangkan atas nama strategi komoditas: program berita dapat menghadirkan konten hiburan bernuansa (Halim, 2013); lembaga penyiaran yang berpihak pada kepentingan kelompok politik tertentu (Halim, 2018); bahkan saluran televisi tidak menayangkan konten tertentu, meskipun dianggap memiliki nilai informasi yang tinggi.

Padahal, Kritikus sosial Michael Novak mengatakan bahwa pilihan televisi sebagai media dokumenter bukannya tanpa alasan: “Televisi membentuk geografi jiwa. Televisi secara bertahap membangun struktur harapan jiwa. Ini seperti sekolah

yang mengajarkan pelajaran secara bertahap, selama bertahun-tahun. Televisi mengajarkan jiwa-jiwa muda dan mengajarkan mereka untuk berpikir” (Vivian, 2008, p. 225). Artinya, televisi akan mengajarkan nilai, norma sosial, dan pengalaman kepada pemirsanya, jika pemirsanya dianggap pasif. Televisi berfungsi untuk menyebarkan ideologi.

Mengingat Indonesia memiliki karunia kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, Salah satunya Kabupaten Teluk Bintuni, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Papua Barat. Wilayah ini memiliki luas 18.637 Km<sup>2</sup>, atau 21% dari total luas Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 distrik, 4 distrik pemekaran, 115 kampung dan 145 kampung pemekaran serta dua kelurahan (dalam Montesori, 2021, para. 22). Di wilayah Teluk Bintuni juga terdapat 7 suku yang mendiami kawasan tersebut. 7 kelompok sub-suku besar yang mendiami Teluk Bintuni antara lain sub-suku Sebyar, Wamesa, Kuri, Iratutu, Moskona, Sough, dan Sumuri (Suyanto, 2008, p. 164).

Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang memiliki banyak kegiatan industri di bidang pertambangan, perikanan, perkebunan, dan kelautan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat Teluk Bintuni menjadi Kabupaten Terkaya di Indonesia berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Teluk Bintuni berada di posisi pertama sebagai kabupaten terkaya di Indonesia dengan PDRB per kapita sebesar Rp 487,41 juta (dalam Aditiya, 2021, para. 10).

Meskipun menjadi wilayah kabupaten terkaya di Indonesia, karena menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah, persoalan tentang penyalahgunaan sumber daya alam pun masih terjadi, seperti eksploitasi dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Teluk Bintuni. (Arifin, komunikasi pribadi, 19 Agustus, 2021). Saat ini, potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Bintuni adalah gas alam dengan cadangan 14,3 TCF dan terdapat juga terdapat potensi minyak bumi (“Gambaran Umum dan Kondisi”, n.d., p. 22). Salah satu perusahaan raksasa yang aktif dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas di wilayah Teluk Bintuni adalah perusahaan BP Berau yang sudah

beroperasi sejak tahun 2008, pengeboran ini mengambil kawasan di lepas pantai dan daratan di sekitar kawasan Teluk Bintuni (“Gambaran Umum dan Kondisi”, n.d., p. 20). Belakangan, kehadiran perusahaan BP Berau banyak merugikan masyarakat karena tidak AMDAL yang tak terealisasi.

Hal tersebut tentunya berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU), pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan isu tentang perubahan iklim yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem meningkat 16% di seluruh dunia, di Asia, mengalami peningkatan drastis hingga 190%, khusus di Indonesia mencapai angka 53% (“Isu Kerusakan Lingkungan”, 2021, para. 2). Di sisi lain, aktivitas masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan juga sangat bergantung pada alam dan lingkungan. Jika alam serta lingkungan rusak, maka berdampak pula terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Tak heran, angka kemiskinan masih menjadi persoalan di Teluk Bintuni. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni (“Kabupaten Teluk Bintuni”, 2021), pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 19,22 ribu angka kemiskinan dari total 87 ribu penduduk yang ada di Teluk Bintuni. Garis kemiskinan Teluk Bintuni juga terus meningkat, mengutip dari rri.co.id, tercatat pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar Rp. 549.169 perkapita per bulan, tahun 2017 Rp. 583.323, tahun 2018 Rp. 587.770, tahun 2019 Rp. 644.838, hingga tahun 2020 sebesar Rp. 683.667 per kapita per bulan (“Angka Kemiskinan”, 2021, para. 5).

Data lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa Teluk Bintuni menempati posisi ke-29 dari 548 kabupaten/kota dalam kategori jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia, dengan persentase sebanyak 29,39 persen masyarakat miskin secara ekonomi yang terdapat di Teluk Bintuni (“Persentase Penduduk Miskin”, 2020). Berbicara mengenai kemiskinan, tak semata karena adanya kerusakan alam yang diakibatkan kegiatan industrial, tetapi dikarenakan adanya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam (Suryadi, 2020, para. 4). Dilihat dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi

Papua Barat, Teluk Bintuni memiliki kelas resiko bencana yang tinggi. Banjir menjadi bencana yang beresiko yang paling tinggi diantara bencana lain.

4.	Teluk Bintuni	167	Tinggi	Banjir	36	Tinggi
				Gempa bumi	22	Tinggi
				Tsunami	10	Sedang
				Tanah longsor	24	Tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	24	Tinggi
				Kebakaran lahan dan hutan	24	Tinggi
				Cuaca ekstrim	4	Rendah
				Kekeringan	24	Tinggi

Gambar 1.1 Tabel Kelas Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014

Sumber: RPJMD Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022

Sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan dan menyediakan sarana serta prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai macam ancaman bencana. Terlihat bahwa sampai saat ini, pemerintah daerah setempat masih belum optimal dalam melakukan tindakan penanggulangan. Di dalam PRJMD Papua Barat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (2017, p. 4.5). Selain menanggulangi bencana, pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk membangun sebuah daerah.

Dalam melakukan pembangunan nasional, sangatlah penting untuk memperhatikan pembangunan desa/kampung. Mengingat total desa di Indonesia, yaitu 73.670 desa (Prastiwi, 2018). Tak heran jika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan jika desa adalah pembentuk Indonesia. Maka dari itu, penting untuk setiap pemerintah daerah agar dapat membangun sebuah daerah sampai ke pelosok kampung atau desa. Berbeda dengan kota, desa memiliki permasalahan yang lebih besar, salah satunya adalah pemberdayaan manusia yang rendah (Desa, 2021, para. 2)

Menurut Sugiri, pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Seluruh jajaran di pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat

besar untuk memberdayakan masyarakatnya. (Sugiri, 2012, p. 61) Mengingat permasalahan kemiskinan yang menjadi sorotan di Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga diperlukan pemberdayaan ekonomi secara masif oleh pemerintah kepada masyarakatnya secara merata.

Saat ini, Indonesia sedang berfokus pada konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk pembangunan berkelanjutan di desa, seharusnya menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang sudah disesuaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Permendesa PD TT No. 13/2020.



Gambar 1.2 SDGs Desa 2021

Sumber: *Website Resmi Kampung Melati Jaya*

Tak kalah penting, yaitu faktor kebudayaan. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang mendiami ribuan Pulau Nusantara. Tentunya berbagai macam suku tersebut memiliki adat istiadat yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan

aset kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu proses interaksi antara masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersama dengan masyarakat lainnya. Menurut Gazalba dalam Teng (2017, p. 71) kebudayaan dapat didefinisikan sebagai cara berpikir yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam satu ruang dan waktu sehingga terjalinnya suatu kegiatan yang membentuk kesatuan sosial. Berbagai macam kebudayaan yang ada memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Setiap kelompok masyarakat yang berada di bumi memiliki sistem sosial dan budaya yang berbeda dan merupakan dasar hidup mereka, sehingga sistem sosial dan budaya yang dimiliki berpengaruh terhadap pola perilaku hidup masyarakat (Mansoben, 2003, p. 47). Tentunya sistem sosial dan budaya setiap kelompok masyarakat selalu berbeda, kondisi alam dan letak geografis dari masing-masing wilayah yang masyarakat diami mempengaruhi perbedaan tersebut. Dalam karya ini penulis akan mengangkat menjadikan Suku Wamesa sebagai salah satu suku yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni karena berdasarkan keterangan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu warga Teluk Bintuni, suku tersebut cukup tertinggal dan wilayahnya terisolir.

Suku Wamesa merupakan salah satu suku yang terdapat di Teluk Bintuni dan berada di Distrik Wamesa. Masyarakat di sana rata-rata melakukan aktivitas berkebun, berburu, dan menangkap ikan di sungai maupun di laut. Meskipun untuk bertahan hidup mereka mengandalkan alam, masyarakat di Distrik Wamesa menerapkan norma dan menjunjung tinggi aturan bahwa tidak boleh mengambil sesuatu dari alam secara berlebihan (Masyewi, komunikasi pribadi, 3 Maret, 2022). Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa masyarakat adat dianggap sebagai pewaris untuk menjaga alam dengan baik dan memahami bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia dan alam (United Nations, n.d., para. 1). Manusia sebagai salah satu makhluk sosial mempunyai hubungan yang erat, baik antara sesama manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya, maupun dengan lingkungan alam di mana manusia hidup dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Bahkan berbeda dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya,

manusia mempunyai suatu kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan manapun.

Menurut Tjahjono dalam Wibowo, Wasino & Setyowati (2012) menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan norma atau aturan yang ditaati oleh masyarakat setempat sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang melekat pada masyarakat tersebut. Kearifan lokal dapat menjadikan 4 penentu keberlangsungan masyarakat, dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungan dengan baik dan dapat meminimalisasi kerusakan alam yang marak terjadi (2012, p. 26). Hal tersebut memberikan makna bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan, kegiatan, dan kepercayaan suatu masyarakat dalam mengelola alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Meskipun menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam, pariwisata dan cerita sosial budaya, minimnya informasi tentang Teluk Bintuni masih menjadi permasalahan, karena jika dilihat dari realitas yang ada, media-media saat ini jarang memberikan informasi atau mengekspos daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Jika dilihat dari perspektif sosial-budaya, keragaman budaya Indonesia hanya memiliki peluang yang kecil untuk bias hadir dalam pemberitaan media dan layar televisi yang dikuasai media-media besar di Jakarta (Armando, 2014, p. 41). Isu-isu tentang kemiskinan dan eksploitasi lingkungan yang terjadi di luar Pulau Jawa pun masih jarang tersentuh oleh media nasional. Dalam program berita, daerah tertentu masih tidak banyak mendapatkan ruang, hanya beberapa pemberitaan yang mendapatkan ruang dan pemberitaan itu harus “bombastis” baik berupa berita negatif seperti kasus kecelakaan, kriminal, maupun berita positif seperti sosok inspiratif. Konten yang diangkat dalam pemberitaan yang dikirim kontributor daerah tertentu masih ditentukan oleh pekerja media yang ada di Jakarta (Nuraeni, 2016, para. 5). Mayoritas media saat ini lebih memberikan pemberitaan yang ter-sentralisasi terhadap kota-kota besar seperti Jakarta, sehingga masyarakat kurang membuka mata terhadap kondisi di luar Pulau Jawa.

Tabel 1.1 Distribusi konten berdasarkan konteks geografis 10 stasiun televisi swasta, per pulau, tahun 2013

Pulau	Persentase Pemberitaan
Jawa	69,6%
Papua	1,1%
Maluku	1,8%
Sulawesi	5,8%
Kalimantan	3,4%
Bali & Nusa Tenggara	3,6%
Sumatra	14,7%

Sumber: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pulau Jawa mendominasi konten pemberitaan dengan persentase sebanyak 69,6% pemberitaan terkonsentrasi di pulau Jawa. Jika diteliti lebih dalam lagi, menurut riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), dalam 69,6% pemberitaan yang terkonsentrasi di pulau Jawa tersebut, terdapat 49% konten pemberitaan hanya terkonsentrasi di Jakarta, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur dengan 18,4% dan 16,9% (Nugroho et al., 2013, p. 37). Tentunya apa yang dibutuhkan masyarakat di setiap daerah bukan hanya informasi mengenai apa yang terjadi di kota-kota besar, namun juga kondisi yang terjadi di masing-masing daerah. Menurut Armando, implikasi penting dari adanya sentralisasi penyiaran dan pemberitaan di Indonesia adalah hilangnya potensi media-media di Indonesia sebagai sebuah *public sphere* yang dibutuhkan bagi demokratisasi di Indonesia (2014, p. 41).

Dalam sistem siaran yang tersentralisasi ini, para jurnalis dari berbagai daerah mengirimkan hasil liputan dan beritanya terlebih dahulu ke redaksi yang berada di Jakarta untuk ditentukan mana yang pantas untuk disiarkan kepada publik secara nasional (Armando, 2014, p. 42). Tentunya hal tersebut menyebabkan peluang yang sangat terbatas bagi setiap pemberitaan yang dikirim dari daerah untuk bisa dimuat dalam program berita media tertentu. Selain itu, setiap pemberitaan yang berasal dari daerah harus bersaing dengan berita di kota-kota besar seperti Jakarta yang seringkali dianggap memiliki nilai berita yang lebih tinggi.

Konglomerasi media juga menjadi salah satu penyebab media nasional lebih memilih untuk mendistribusikan informasi yang bersifat “Jakarta-sentris”. Menurut Tapsell (2017), akibat dari konglomerasi media ini pada membuat produksi berita dan informasi yang semakin 'Jakarta-sentris', karena pembangunan media yang sudah terpusat di Jakarta membuat semua keputusan media dilakukan oleh jurnalis dan orang-orang yang memiliki kepentingan dan berdomisili di Jakarta. (dalam Adam, 2018, para. 19).

Selain itu, meskipun badan lembaga penyiaran publik sudah ada sejak lama, pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami pengertian sebenarnya dari penyiaran publik. Bahkan bagi kalangan pemilik media yang memiliki kepentingan masih banyak yang menganggap bahwa penyiaran publik itu sama dengan penyiaran pemerintah, media massa yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia juga tidak melakukan upaya untuk mengedukasi dan memperkenalkan keberadaan penyiaran publik secara proporsional (Darmanto, 2020, p. 4).

Oleh karena itu, penulis akan merancang karya jurnalistik yang tak Jawa-sentris dalam bentuk Dokumenter Televisi. Pembuatan karya ini berkolaborasi dengan dua rekan penulis, sehingga karya ini dikemas dalam bentuk program serial dokumenter yang terdiri dari enam episode. Tentunya, program serial dokumenter ini memiliki benang merah dari satu episode ke episode lainnya. Dokumenter merupakan sebuah program yang menyajikan suatu cerita nyata dan dilakukan di lokasi sesungguhnya, didukung *Narasi* untuk melengkapi cerita. Program dokumenter bukan hanya sekedar suatu cerita, tetapi merupakan urutan kejadian baik yang sudah terjadi di masa lampau ataupun yang sedang terjadi saat ini, sehingga dalam proses produksinya terkadang tidak terlalu memerlukan sinopsis, tetapi hanya *treatment* sebagai kerangka cerita yang mengandung benang merah atau garis besar penuturan alur cerita dengan urutan peristiwa dan kejadian secara mendalam (Latief & Utud, 2015, p. 42). Sedangkan, Fred Wibowo (1997, p. 146) menjelaskan bahwa program video dokumenter merupakan suatu program yang menyajikan suatu kenyataan berdasarkan fakta objektif yang memiliki nilai

eksistensial dan esensial, yaitu pengemasan urutan kejadian yang menyangkut dengan lingkungan hidup, kehidupan, dan situasi nyata.

Tujuan Penulis membuat karya ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia terutama generasi Y dan generasi Z tentang kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Penulis memilih sasaran penonton untuk generasi Y dan Z karena kedua generasi tersebut memiliki karakteristik kehidupan yang sesuai dengan tujuan karya yang akan penulis buat yaitu memberikan pengetahuan mengenai perpaduan kebudayaan, kekayaan alam, dan tradisi yang harus dilestarikan untuk memperluas wawasan terkait kebudayaan nusantara.

Tentunya segala bentuk informasi terkait potensi alam dan kebudayaan yang terdapat di Teluk Bintuni perlu disampaikan secara jelas agar dapat menjadi perhatian publik. Proses penyebaran informasi di era yang serba praktis dengan kemunculan internet saat ini memudahkan manusia dalam bertukar informasi. Berdasarkan hasil riset oleh *Hootsuite* dan *We Are Social* mengenai *Global Digital Report 2021*, dari total populasi 274,9 juta penduduk, Indonesia mencetak 202,6 juta pengguna internet hingga Januari 2021 (Stephanie, 2021, para. 3). Hal tersebut menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen pada Januari 2021.

Selain itu, kemunculan dan perkembangan teknologi komunikasi pada akhirnya membawa media massa berkembang menjadi media baru. Media baru memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi yang terus berkembang, dan memungkinkan adanya digitalisasi yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi dan informasi (McQuail, 2011, p.151). Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi media sebagai penyebaran informasi yang mampu menjangkau banyak khalayak dengan serempak dan cepat.

Dalam hal ini, teori yang akan penulis gunakan adalah teori media baru atau *new media theory*. Kemunculan media baru dan teknologi informasi di era saat ini memungkinkan digitalisasi informasi melalui *audio visual* yang dapat disimpan, diolah, dan dapat ditransmisikan dengan mudah dan cepat melalui komputer digital

(Sugiharti, 2014, p. 70). Perubahan tersebut ditandai dengan adanya pergeseran dalam ruang lingkup media yang dinamakan media baru. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa saat ini perpaduan antara praktik jurnalisme multimedia dan teknologi informasi semakin berkembang dalam bidang jurnalisme. Internet dan *world wide web* yang bagian dari media baru merupakan hasil revolusi teknologi komunikasi dan informasi.

Media baru juga sangat berhubungan erat dengan konsep konvergensi media baru. Menurut Jenkins dalam Friedrichsen & Kamalipour (2017, p.78) konvergensi media baru didefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan dan penyatuan di mana teknologi informasi, konten, pemirsa, dan industri saling berhubungan. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan penyebaran informasi tentang Teluk Bintuni dalam bentuk visual. Media baru dapat menawarkan suatu kapasitas untuk memperluas *volume* informasi yang memungkinkan setiap individu mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, McQuail (2000, p. 119) berpendapat bahwa kebanyakan media baru saat ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang bersifat interaktif dan memungkinkan adanya penerimaan informasi yang luas bagi khalayak. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi media baru, diharapkan karya program dokumenter ini dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Metode yang akan diterapkan dalam produksi program ini adalah metode etnografi komunikasi. Menurut Kusnadi (2013, p. 13), metode etnografi komunikasi seringkali digunakan sebagai metode alternatif untuk melakukan observasi secara langsung, meneliti latar, proses, dan tujuan komunikasi serta memahami kebiasaan atau perilaku sosial budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu interaksi sosial. Etnografi komunikasi mengacu pada pengertian ilmiah sosial tentang bagaimana kehidupan kelompok masyarakat tersebut dan landasan budaya kemanusiaan (Denzin, 2009, p. 30). Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Teluk Bintuni dan Suku Sebyar yang dikemas dalam bentuk program dokumenter.

Dalam karya ini penulis memilih *YouTube* sebagai medium dalam menyebarluaskan karya yang akan penulis buat. Penulis bekerjasama dengan media *Narasi*. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menjangkau lebih luas khalayak atau penonton karena *Narasi* memiliki jumlah penonton yang sangat tinggi dalam platform *YouTube*. *Narasi* juga memiliki visi misi dan agenda yang sama dengan karya yang ingin penulis buat, yaitu membuat konten-konten pemberitaan yang mengkritik, mengangkat isu-isu, dan kesenjangan sosial. Selain itu, penulis memilih *YouTube* sebagai medium dalam menyebarkan karya program dokumenter karena *YouTube* merupakan sebuah situs web berbagi video yang populer sehingga pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berbagi klip video secara gratis (Faiqah, Nadjib, & Amir, 2016, p. 259). Selain itu, berdasarkan hasil survei *We Are Social* dan *Hootsuite* (2021, p. 33) pengguna media sosial *YouTube* hingga Januari 2021 menempati urutan tertinggi ke-2 di Indonesia sebagai situs yang sering dikunjungi. Sedangkan jumlah pengguna media sosial *YouTube* mencapai 93,8 persen pada Januari 2021.

Dengan menerapkan prinsip jurnalisme positif, diharapkan karya ini dapat membantu pemerintah dalam menangani persoalan yang ada di Teluk Bintuni sekaligus membuka mata masyarakat Indonesia tentang fakta yang sebenarnya terjadi di Teluk Bintuni. Tentunya kehadiran jurnalisme positif ini menawarkan perspektif baru dalam pemberitaan. Jurnalisme positif menekankan peran pers sebagai pencerahan, dan bisa menumbuhkan optimisme sebagai bangsa.

Berdasarkan sejumlah argumentasi di atas, pembuatan karya ini menjadi penting karena karya ini bertujuan untuk memberikan informasi tidak hanya memfokuskan pada potensi kekayaan alam dan kebudayaan yang ada di Teluk Bintuni, tetapi juga kritis untuk memberikan informasi mengenai persoalan dan fakta yang sedang terjadi di Teluk Bintuni. Diharapkan karya ini dapat membantu pemerintah untuk memberikan solusi dalam menangani persoalan yang sedang terjadi dengan menempatkan suara masyarakat adat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

## 1.2 Tujuan Karya

Dalam pembentukan karya program video dokumenter *Rumah Torang*, terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai, yakni sebagai berikut.

1. Menghasilkan video program berupa serial dokumenter yang dapat ditonton secara daring melalui platform Youtube dengan target penonton sebanyak 10.000.
2. Menghasilkan produk jurnalistik yang dapat meningkatkan kesadaran mengenai isu di luar Jawa, salah satunya yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Menggugah generasi muda untuk memiliki perhatian terhadap desa/kampung.

## 1.3 Kegunaan Karya

Kegunaan yang ingin penulis capai melalui karya ini antara lain,

1. Dengan mengedepankan nilai-nilai jurnalistik, diharapkan karya ini menjadi salah satu sumber informasi untuk masyarakat Indonesia mengenai kehidupan sosial dan kebudayaan yang ada di Teluk Bintuni.
2. Untuk membuka mata masyarakat Indonesia terhadap Papua Barat khususnya Teluk Bintuni.
3. Membantu pemerintah dalam menangani persoalan yang ada di Teluk Bintuni

U M N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A